

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menekan angka BABS yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program Kabupaten Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF) pada tahun 2017 sudah berjalan dengan optimal. Implementasi yang telah berjalan dengan optimal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:
 - a. Sumber-sumber kebijakan yang dimiliki Kabupaten Boyolali dalam implementasi program Kabupaten Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF) sudah memadai. Sumber-sumber tersebut menjadi penunjang dalam kelangsungan dan kelancaran implementasi program.
 - b. Keterlibatan seluruh kelompok kepentingan menjadi poin penting dalam implementasi program Kabupaten Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Boyolali.

- c. Adanya kemauan masyarakat untuk merubah perilaku BABS dan membangun jamban untuk mewujudkan keberhasilan program Kabupaten Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Boyolali.
2. Perbedaan perilaku warga di Boyolali khususnya di Kecamatan Sawit dan Kemusu sangatlah mempengaruhi implementasi program Kabupaten Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF). Tingginya angka BABS di Kecamatan Sawit disebabkan karena faktor kebiasaan atau perilaku warga sekitar BAB tidak pada jamban sedangkan di Kecamatan Kemusu disebabkan oleh keadaan geografis yang memang sulit air dan keadaan ekonomi yang memang mayoritas penduduknya kesulitan dana untuk membangun jamban.
3. Kecamatan Sawit dan Kemusu adalah dua Kecamatan yang dinyatakan *ODF* terakhir dibandingkan dengan Kecamatan lain sehingga dua Kecamatan tersebut membutuhkan tenaga ekstra agar *ODF* sebelum jadwal verifikasi. Kecamatan Kemusu yang wilayahnya tidak ada air lebih mudah untuk diubah perilaku masyarakatnya, yaitu dengan membuat WC model cemplung atau cubluk yang memang diprioritaskan untuk wilayah yang tidak ada air. Berbeda dengan Kecamatan Sawit yang membutuhkan waktu lebih lama karena diwilayah tersebut banyak air sehingga masyarakat lebih memanfaatkan air yang mengalir di depan rumahnya kemudian didirikan

bilik untuk BAB. Keadaan ini yang membuat masyarakat Kecamatan Sawit sangat sulit untuk diubah.

1. Ada beberapa faktor yang menghambat implementasi program Kabupaten Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF) sehingga keberhasilan program memakan waktu yang cukup lama untuk mencapai keberhasilan program Kabupaten Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF).

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diperlukan rekomendasi langkah-langkah yang mungkin bisa digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam Implementasi Program Kabupaten Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF). Adapun langkah-langkah yang mungkin bisa digunakan adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya adalah perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja petugas kesehatan di tingkat desa dan kecamatan dalam pelaksanaan program Kabupaten Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF) karena keaktifan petugas kesehatan berperan penting dalam mengurangi angka BABS.

2. Saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan implementasi program Kabupaten Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF) di Puskesmas yaitu dibuatkannya petugas khusus yang menangani permasalahan BABS sehingga petugas kesehatan ini tidak memiliki tugas ganda.
3. Pemicuan tidak hanya dilakukan di wilayah yang angka BABS tinggi tetapi juga dilakukan di beberapa Desa yang warganya tidak memiliki jamban dan memberikan bantuan jamban setiap tahunnya sampai akses jamban sehat di Boyolali mencapai 100%.
4. Pemerintah Desa diharapkan membuat peraturan Desa sekaligus sanksi yang membuat warga yang masih BABS jera agar dapat mengurangi angka BABS secara cepat.